

TESIS

**PERAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DALAM RANGKA
OTONOMI KHUSUS**



ABNER KEHEK

No. Mhs. : O7.1163/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2008**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ABNER KEHEK
Nomor Mahasiswa : 07.1163 / PS / MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Peran Pemerintah Provinsi Papua Terhadap Kebijakan
Investasi Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

.....

.....

Aenny Retnowati, SH, MHum

.....


.....



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ABNER KEHEK
Nomor Mahasiswa : 07.1163 / PS / MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Peran Pemerintah Provinsi Papua Terhadap Kebijakan
Investasi Dalam Rangka Otonomi Khusus

Nama Penguji

Tanggal

Tanda Tangan

(Ketua)

Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

.....

.....

(Sekretaris)

Anny Retnowati, S.H.,M.Hum

.....

(Anggota)

Dr. Ign, Sumarsono Raharjo, S.H. M.Hum

21.10.2008

.....

Ketua Program Studi

.....
Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sepanjang sepengetahuan penulis, permasalahan hukum yang diteliti belum pernah ditulis oleh penulis lain (bukan duplikasi), jika ternyata ada sebagian isi dari tesis ini yang serupa / mirip dengan hasil karya penulis lain tanpa penulis sebutkan sumber kutipannya, maka hal ini adalah suatu kebetulan semata yang tidak disengaja. Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Yogyakarta, 2008

Yang menyatakan,

ABNER KEHEK

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tesis dengan judul **Peran Pemerintah Provinsi Papua Terhadap Kebijakan Investasi Dalam Rangka Otonomi Khusus**. Tesis ini berisi tentang hasil penelitian normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dalam bidang investasi dan kebijakan pemerintah dalam rangka otonomi daerah.

Provinsi Papua adalah Provinsi yang memiliki kebijakan khusus sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, dan dalam rangka memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang investasi maka pemerintah provinsi papua dapat melakukan kebijakan khusus di bidang investasi terutama menyangkut pembuatan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur dan mengarahkan investasi serta investor yang menanamkan modalnya serta proses pelaksanaan dan pemberian bantuan dalam mempermudah proses perizinan, pengaturan tenaga kerja, dan jaminan keamanan bagi investor yang menanamkan modalnya di Provinsi Papua, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal maka penulis hendak mengkaji bagaimana Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam menetapkan kebijakan pemerintah terhadap investor dan manfaat investasi bagi masyarakat adat Papua.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan politik hukum yaitu penulis mencoba megkaji bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Papua dalam bidang investasi.

Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan dapat memberikan suatu tambahan wacana ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya. Semoga tesis ini dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran demi kemajuan ilmu hukum pada umumnya, dan kemajuan hukum investasi Indonesia pada khususnya perkembangan investasi di Provinsi Papua.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung selesainya tesis ini, yaitu kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya kepada penulis hingga saat ini. Selama hidup penulis bersyukur telah merasakan berkah dan perlindunganNya di segala bidang hingga penulis dapat menjadi seseorang seperti sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sangat baik dan ramah dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.
5. Ibu Anny Retnowati, SH, MHum. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan baik dan sabar mau memberikan masukan-masukan yang positif dan memperbaiki banyak kesalahan-kesalahan penulis demi penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis selama setahun di Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Kedua orangtua penulis yang tanpa henti terus memberikan dukungan baik moril maupun materiil demi tercapainya cita-cita penulis.
8. Bapak JKH ROEMBIAK selaku kepala biro hukum setda Provinsi Papua yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Semua teman-teman kuliah penulis selama kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis benar-benar senang telah mengenal kalian semua dan tidak akan melupakan masa-masa susah maupun senang yang telah kita lalui bersama.
10. Semua orang-orang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis selama menjalani kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis terbuka untuk menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Yogyakarta, 2008

ttd

ABNER KEHEK

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Intisari.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Peran Pemerintah Provinsi Papua.....	15
2. Kebijakan Investasi.....	23
a). Kebijakan	23
b). Investasi	30
3. Otonomi Khusus.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Hukum.....	48
C. Bahan Hukum.....	49
a) Bahan Hukum Primer.....	49
b) Bahan Hukum Sekunder.....	51
c) Bahan Hukum Tersier.....	51
D. Nara Sumber.....	51
E. Analisis Hukum.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Letak Geografis Provinsi Papua.....	54
B. Pembagian Kewenangan.....	55
C. Pengendalian Penanaman Modal di Provinsi Papua.....	56
D. Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi Papua.....	63
E. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Investasi di Provinsi Papua.....	80

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran.....	84

Daftar Pustaka



INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Peran Pemerintah Provinsi Papua Terhadap kebijakan Investasi Dalam Rangka Otonomi khusus. Dengan melihat aturan-aturan hukum yang berlaku serta bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Papua Dalam menarik dan mengarahkan investor untuk berinvestasi di Provinsi Papua.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mempelajari berbagai literatur hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam bidang investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dengan melihat peraturan-peraturan dan kebijakan yang di buat oleh pemerintah Provinsi Papua dalam menarik dan mengarahkan investor serta di bandingkan peraturan hukum nasional yang berlaku di bidang investasi. Hasil dari perbandingan tersebut akan menentukan kebijakan apa yang harus di ambil oleh pemerintah Provinsi Papua dalam menarik dan mengarahkan investor di Provinsi Papua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan hukum nasional yang berlaku di bidang investasi belum diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya dalam kewenangan di bidang investasi yang berikan kepada Pemerintah Provinsi Papua serta belum adanya peraturan daerah Provinsi Papua yang mengatur tentang investasi di Provinsi Papua dan peraturan daerah tentang pembebasan tanah ulayat bagi kegiatan investasi dari hasil penelitian ini maka menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Papua segera membuat peraturan daerah mengatur tentang investasi yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum nasional yang berlaku untuk dapat menarik dan mengarahkan investor untuk dapat berinvestasi di Provinsi Papua.

Kata-kata kunci : Peran Pemerintah Provinsi Papua, kebijakan pemerintah, Otonomi Khusus.